

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan penjabaran yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, ditarik kesimpulan bahwa implementasi ruang terbuka hijau di kecamatan Gombang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031. Hal tersebut dibenarkan berdasarkan hasil penelitian penulis mewawancarai responden yang menyampaikan bahwa pada setiap rumah disisakan luas 10% guna untuk RTH dan penanaman tanaman hias. Yang dimana diketahui bahwa 10% luas tanah tersebut terdiri dari 5% untuk tanaman hias dan 5% untuk bio pori pada RTH.

#### **B. Saran**

Berdasarkan atas kesimpulan yang dijabarkan diatas, penulis menyampaikan saran kepada perangkat desa Kecamatan Gombang agar secara berkala melakukan observasi dilapangan guna mengetahui dan memantau sejauh mana keberlangsungan dan keberlanjutan program ruang terbuka hijau di Kecamatan Gombang agar sesuai dengan impian yang cita-citakan baik oleh pemerintah maupun warga setempat dalam mewujudkan Kampung Ramah Lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdul Majid, 2014, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis.*, Interes Media, Bandung,

Agostiono, 2010, *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*, Rajawali Press, Jakarta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen, 2021. *Kecamatan Gombong Dalam Angka 2021*, CV.Retsmart Grafindo, Kebumen.

Daniel A.Mazmanian and Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy.*, Scott Foresman, USA.

Masrochatun. 2020. *Kajian Potensi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan Pembangunan Hijau dan Perizinan: Diplomasi, kesiapan perangkat dan pola standarisasi.*

Muhammad Akib, dkk, 2013, *Hukum Penatan Ruang.*, PKKPU FH UNILA, Bandar Lampung.

Muhammad Fathurrohman dan Sulityorini, 2012, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik.*, Teras, Yogyakarta.

Purwanto dan Sulistyastuti, 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Purwanto dan Sulistyastuti, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.* Yogyakarta: Gava Media.

Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.*

Santoso Urip, 2015, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Penerbit Prenamedia Group, Jakarta.

Silalahi, M. Daud. 2006. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.* Alumni Bandung.

Waskito dan Hadi Arnowo, 2017, *Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang.*, Prenadamedia Group Kencana, Jakarta.

Yunus Wahid A.M, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang.*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

### **Jurnal**

Ahmad Jazuli, 2017, “Penegakan Hukum Penataan Ruang dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 06, No.02, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm.273. (Muhammad Akib, 2013) (Muhammad Akib, 2013)

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” *Jurnal Baca*, Volume 1 Agustus 2008, Universitas Pepabari Makassar, 2008.

Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum” , dalam *Pendulum Antinomi Hukum*, Antologi 70 Tahun.

Darmawati, Choirul Saleh, Imam Hanafi. 2015. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* ISSN. 2442-6962 Vol. 4, No. 2 (2015)

Eduardus, Maturbung. 2011. Model Implementasi Soren C Winter. (<https://www.google.co.id/search?q=model+implementasi+winter&oq=mode&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l2j69i60l2.3924j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>) di akses 16 September 2022 pukul 13:05.

Ferdiansyah, B. (2022). Efektivitas Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Lhokseumawe. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Hartanto, W. (2006). Kinerja Pengelolaan Sampah di Kota Gombong Kabupaten Kebumen. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Kementerian PUPR. (2019). Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan peraturan menteri pupr nomor 14/PRT/M/2018. Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (Nsup)/ Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Wilayah Iii Tahun Anggaran 2019, September.

Kusuma, R. P., & Rahmawati, D. (2020). Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v8i2.46525>

Subekti, S., Prayoga, I., & Sudrajat, A. S. E. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Penanganan Kawasan Kumuh Di Kawasan Pecangaan Kabupaten Jepara. *Indonesian Journal of Spatial Planning*, 1(2), 45.  
<https://doi.org/10.26623/ijsp.v1i2.3105>

Taufik Ahmad. 2015. Peningkatan Pemahaman Perangkat Kelurahan dan Kecamatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian di Kecamatan Tembalang Kota Semarang. (<http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/81501>) di akses 16 September 2022 pukul 13:10

Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10.  
<https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri PU No. 05/PTR/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031

SK Kumuh Kebumen Th 2020.

### **Internet dan lain-lain**

Administrator, Wakil Bupati Resmikan Program Pembangunan di Wonokriyo, [https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news\\_detail/7/1094](https://www.kebumenkab.go.id/index.php/web/news_detail/7/1094), diakses 01 November 2022.

Kec-gombong.kebumen.go.id, Visi dan Misi Kecamatan Gombong, <https://kec-gombong.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/2/visi-dan-misi>, diakses pada hari Selasa, 01 November 2022 Pukul 17.32 WIB.

Kompas.com, Peraturan Daerah : Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya, <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya#:~:text=Adapun%20fungsi%20Peraturan%20Daerah%20antara,Perundang%20Dundangan%20yang%20lebih%20tinggi>.

Lindungihutan.com, Lingkungan adalah : Pengertian Menurut Ahli, Jenis dan Manfaat Lingkungan, <https://lindungihutan.com/blog/lingkungan-adalah/#:~:text=Lingkungan%20Adalah%20Kesatuan%20Ruang%20dan%20Isinya,-Lingkungan%20adalah%20kesatuan&text=Sedangkan%20menurut%20Kamus%20Bes ar%20Bahasa,dan%20mempengaruhi%20perkembangan%20kehidupan%20manusia>.